

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Strategik Inspektorat II sebagaimana yang tercantum dalam peran strategik Inspektorat Jenderal yaitu :

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.

2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pada pembimbingan -pendampingan dan pengawasan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan maupun konsultasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.
3. Pelimpahan hampir seluruh tugas sektor Industri kepada pemerintah daerah, merupakan cermin dari konsistensi Kementerian Perindustrian dalam mengaktualisasikan Peraturan / Perundang-Undangan. Namun demikian, dari sisi pengawasan masih terdapat perbedaan pemahaman yang berimplikasi terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi lebih jelas.
4. Dalam menyikapi perkembangan paradigma pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Inspektorat II memiliki peran strategis dalam rangka mendayagunakan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha
 - Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.
 - Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah "Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri".

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

3. Tujuan Pengawasan

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan "***Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industry yang efektif***" sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

4. Strategi pengawasan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi pengawasan yang digunakan adalah :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c. Mempercepat tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh unsur pengawasan;
- e. Meningkatkan profesionalitas dan kemandirian aparatur pengawasan;
- f. Meningkatkan budaya pengawasan.
- g. Melakukan pengawasan sesuai Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (watch dog) menjadi pembinaan (counseling partner) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (quality assurance). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;

- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5. Kebijakan Pengawasan
- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
 - b. Menerapkan audit berbasis resiko.
6. Obyek Pengawasan
- Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 14 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 11 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 9 Unit.
7. Fokus Pengawasan
- Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:
- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP)
 - b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN.
 - c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2015 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100%
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172%
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
 - a. Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
 - b. Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
 - c. Audit Untuk Tujuan tertentu;
 - d. Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan;
2. Layanan Audit Inspektorat II :
 - a. Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan Semester II;
 - b. Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
3. Layanan Moitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:
 - a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. Monitoring dan Evaluasi SPIP;
4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;
5. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II;

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Inspektorat II pada tahun 2016 mempunyai Kegiatan "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II" dengan anggaran awal sebesar Rp. 4.382.877.000,- dan setelah revisi menjadi sebesar Rp. 3.720.700.000,- yang terdiri dari Laporan Hasil Audit Inspektorat II, Laporan Hasil Reviu Inspektorat II, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
1842.001	LAYANAN AUDIT INSPEKTORAT II	27,00 LAYANAN	1.775.438.000	1.775.438.000
1842.001.051	AUDIT KINERJA UNIT PUSAT DAN VERTIKAL SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT II		775.698.000	775.698.000
A	PERSIAPAN AUDIT		22.473.000	22.473.000
B	PELAKSANAAN AUDIT		727.372.000	727.372.000
C	PELAPORAN AUDIT		25.853.000	25.853.000
1842.001.052	AUDIT DANA DEKONSENTRASI PERINDUSTRIAN WILAYAH CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT II		473.178.000	473.178.000
A	PERSIAPAN AUDIT		9.349.000	9.349.000
B	PELAKSANAAN AUDIT		451.477.000	451.477.000
C	PELAPORAN AUDIT		12.352.000	12.352.000
1842.001.053	AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU PENUGASAN PADA INSPEKTORAT II		253.620.000	253.620.000
A	PERSIAPAN AUDIT		85.500.000	85.500.000
B	PELAKSANAAN AUDIT		164.970.000	164.970.000
C	PELAPORAN AUDIT		3.150.000	3.150.000
1842.001.054	AUDIT TEMATIK SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN		272.942.000	272.942.000
A	PERSIAPAN AUDIT		100.025.000	100.025.000
B	PELAKSANAAN AUDIT		170.417.000	170.417.000
C	PELAPORAN AUDIT		2.500.000	2.500.000
1842.002	LAYANAN REVIU INSPEKTORAT II	30 LAYANAN	617.172.000	617.172.000

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
1842.002.051	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN BMN SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT II		613.422.00	613.422.000
A	PERSIAPAN AUDIT		107.580.000	107.580.000
B	PELAKSANAAN AUDIT		472.862.000	472.862.000
C	PELAPORAN AUDIT		32.980.000	32.980.000
1842.002.052	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT II		3.750.000	3.750.000
1842.003	LAYANAN MOITORING DAN EVALUASI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT II	1,00 LAYANAN	1.552.359.000	952.700.000
1842.003.051	MONITORING DAN EVALUASI SAKIP SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT II		32.300.000	32.300.000
A	PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI		1.300.000	1.300.000
B	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI		29.750.000	29.750.000
C	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI		1.250.000	1.250.000
1842.003.052	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN SESUAI KEBIJAKAN PENGAWASAN		1.520.059.000	920.400.000
A	PEMBENTUKAN TIM MONEV PENERAPAN SPIP		112.075.000	112.075.000
B	KONSINYERING PEMBEKALAN PELAKSANAAN MONEV		351.350.000	351.350.000
C	PELAKSANAAN MONITORING PENERAPAN SPIP SATKER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		429.500.000	429.500.000
D	FOCUS GROUP DISCUSSION HASIL PELAKSANAAN MONITORING PENERAPAN SPIP SATKER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		599.659.000	-
E	PELAPORAN HASIL MONEV		27.475.000	27.475.000
1842.004	LAYANAN MANAJEMEN PENGAWASAN INSPEKTORAT II	12,00 LAYANAN	282.980.000	262.515.000
1842.004.051	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat Ii		126.140.000	116.880.000
A	MANAJEMEN PENGAWASAN INSPEKTORAT II		106.200.000	106.200.000
B	PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGAWASAN INSPEKTORAT II		19.940.000	10.680.000
1842.004.052	Koordinasi dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat II		156.840.000	145.635.000
1842.005	DOKUMEN PENGANGGARAN DAN AKUNTABILITAS INSPEKTOIRAT II	12,00 DOKUMEN	154.928.000	112.875.000
1842.005.051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat II		88.280.000	88.280.000
A	PENYUSUNAN DOKUMEN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT II		88.280.000	88.280.000
1842.005.052	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM INSPEKTORAT II		66.648.000	24.595.000

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
A	PENYUSUNAN RENKIN DAN TAPKIN INSPEKTORAT II		34.448.000	12.720.000
B	PENYUSUNAN LAPORAN PP39 (TRIWULANAN) DAN LAKIP INSPEKTORAT II		32.200.000	11.875.000

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dokumen Penetapan Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100%
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172%
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2015. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi

Dari indikator kinerja yang telah dilakukan penjelasan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100%
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172%

Berdasarkan data diatas, perjanjian kinerja tahun 2016 bahwa capaian realisasi indikator prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan sebesar 100% dari target 90%. Hal ini dicapai melalui reuiu laporan keuangan dan BMN semester I Tahun 2016 pada satker cakupan tugas Inspektorat II telah selesai.

Capaian indikator prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold untuk pemeriksaan tahun 2015 sebesar 0,172%, dimana capaian tersebut masih dibawah 3% dari target yang ditetapkan kurang dari 3%. Sehingga untuk indikator capaian prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold tercapai.

2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %

	program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
--	-----------------------------------	--	------------------	------------------

Capaian indikator kinerja Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B yang dapat diukur dengan realisasi sebesar 80,92% dari target 78%. Dimana nilai unit Eselon I binaan Inspektorat II untuk IKTA mendapat nilai 79,135% dan BPPI mendapat nilai 82,711%.

Untuk capaian indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah tercapai berupa pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan menghasilkan rekomendasi perbaikan sbb:

- a. Seluruh satuan kerja segera melakukan workshop penilaian risiko agar seluruh pegawai pada masing-masing bidang/bagian/seksi memahami tentang metode dan tata cara penilaian risiko berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal selaku pembina SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Seluruh satuan kerja agar segera menetapkan secara formal Daftar Risiko dan Kertas Kerja SPIP serta Kertas Kerja Pemantauannya untuk kegiatan tahun 2017 ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- c. Sekretariat Jenderal segera melakukan langkah-langkah strategis terkait pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai selama moratorium penerimaan CPNS masih diberlakukan. Hal ini mengingat makin meningkatnya jumlah pegawai tidak tetap yang direkrut oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sedangkan pedoman dan tata cara perekrutan pegawai tidak tetap tersebut belum ditetapkan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2013, 2014, 2015 dan Tahun 2016

Capaian Kinerja Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)				
1	Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Tingkat Penurunan penyimpangan minimal	12 persen	15,19%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	15 satker	15 satker
2	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan	Menurunnya jumlah temuan berulang dari tahun sebelumnya	20 persen	22,86%
		Temuan auditor eksternal dan pengaduan masyarakat berkurang dari tahun sebelumnya	3 persen	Belum dapat diukur karena belum ada laporan interim dari BPK
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai indeks integritas dari KPK	6.7 indeks	7,32
4	Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja pengembangan industri	Nilai LAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I	65 Skor	Nilai LAKIP untuk Kementerian Perindustrian belum dipublikasikan; Nilai untuk Itjen : 73,23 dan Rata-Rata Eselon I : 61,94
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)				
1	Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN Itjen yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	90 persen	97,87 persen
2	Meningkatkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri	Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri	20 persen	0 persen
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry	1 rekomendasi	2 rekomendasi
		Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan	1 laporan	2 laporan
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)				
1	Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten	SDM pengawasan yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya (bersertifikat)	90 persen	100 persen
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	85 persen	100 persen

Capaian Kinerja Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)				
1	Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja Kementerian Perindustrian	Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Dalam Cakupan Tugas	70 (Predikat B)	Nilai Kemenperin : 73,11. Nilai untuk : 1. Ditjen Agro : 77,84; 2. Ditjen PPI : 74,71; 3. BPKIMI : 73,74; 4. Ditjen KII : 73,35; 5. Setjen :73,11; 6. Ditjen IUBTT : 72,21; 7. Ditjen BIM : 72,06; 8. Ditjen IKM : 70,14; 9. Itjen : 68,02

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	84,6 persen
3	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang professional	Tingkat kualitas laporan keuangan	4 Opini BPK (WTP=4)	Opini BPK WTP
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)				
1	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan	80 persen	95 persen
2	Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
3	Meningkatnya kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan	Persentase permasalahan yang dapat ditangani	85 persen	100 persen
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal dan unit-unit Eselon II Inspektorat Jenderal	70 (Predikat B)	Nilai untuk Itjen : 68,02 1. Nilai untuk Setitjen : 90 2. Nilai untuk Ins 1 : 85,65 3. Nilai untuk Ins 2 : 65,62 4. Nilai untuk ins 3 : 82,12 5. Nilai untuk Ins 4 : 76,51
		Tingkat Penyerapan Anggaran	90 persen	96,34 persen

Capaian Kinerja Tahun 2015

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%

	perundang - undangan			
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, BIM B, Persen : 100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02%
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi
Perspektif Proses Internal				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	40%

		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5%
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B	Nilai : 70,59 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

Capaian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100%
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172%
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan	1	1

		industry dan/atau tata kelola	Rekomendasi	Rekomendasi
--	--	-------------------------------	-------------	-------------

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran TA 2016 sebesar Rp 3.696.004.588,- atau 99,34% dari anggaran Rp.3.720.700.000,- (Anggaran setelah revisi) berdasarkan data E-monitoring. Pada saat penyusunan laporan terdapat perbedaan realisasi keuangan antara data dari laporan triwulan dengan e-monitoring karena terdapat realisasi yang belum diinput dalam aplikasi laporan triwulanan.

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	4.382.877.000	3.720.700.000	3.696.004.588	99,34%	24.695.412	100,00
1842	Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	4.382.877.000	3.720.700.000	3.696.004.588	99,34%	24.695.412	100,00
1842.001	Layanan Audit Inspektorat II	1.775.438.000	1.775.438.000	1.767.885.009	99,57%	7.552.991	100,00
51	Audit Kinerja Unit Pusat Dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	775.698.000	775.698.000	770.275.970	99,30%	5.422.030	
52	Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II	473.178.000	473.178.000	472.948.839	99,95%	229.161	
53	Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat II	253.620.000	253.620.000	252.810.000	99,68%	810.000	
54	Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan	272.942.000	272.942.000	271.850.200	99,60%	1.091.800	
1842.002	Layanan Reviu Inspektorat II	617.172.000	617.172.000	615.200.379	99,68%	1.971.621	100,00
51	Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	613.422.000	613.422.000	611.960.379	99,76%	1.461.621	
52	Reviu Laporan Keuangan Dan Anggaran Satuan	3.750.000	3.750.000	3.240.000	86,40%	510.000	

1842.003	Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Layanan Moitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II	1.552.359.000	952.700.000	939.344.400	98,60%	13.355.600	100,00
51	Monitoring Dan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	32.300.000	32.300.000	31.967.000	98,97%	333.000	
52	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1.520.059.000	920.400.000	907.377.400	98,59%	13.022.600	
1842.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	282.980.000	262.515.000	262.474.800	99,98%	40.200	100,00
51	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat II	126.140.000	116.880.000	116.840.000	99,97%	40.000	
52	Koordinasi Dan Konsultasi Internal/eksternal Inspektorat II	156.840.000	145.635.000	145.634.800	100,00%	200	
1842.005	Dokumen Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat II	154.928.000	112.875.000	111.100.000	98,43%	1.775.000	100,00
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat II	88.280.000	88.280.000	88.050.000	99,74%	230.000	
52	Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Inspektorat II	66.648.000	24.595.000	23.050.000	93,72%	1.545.000	
TOTAL		4.382.877.000	3.720.700.000	3.696.004.588	99,34%	24.695.412	100,00

Realisasi berdasarkan Laporan Triwulanan TA 2016

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	Realisasi E-Mon		Realisasi PP 39	
				TOTAL	%	TOTAL	%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	4.382.877.000	3.720.700.000	3.696.004.588	99,34%	3.508.493.039	80,05%
1842	Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	4.382.877.000	3.720.700.000	3.696.004.588	99,34%	3.508.493.039	80,05%
1842.001	Layanan Audit Inspektorat II	1.775.438.000	1.775.438.000	1.767.885.009	99,57%	1.644.055.588	92,60%

1842.002	Layanan Reviu Inspektorat II	617.172.000	617.172.000	615.200.379	99,68%	609.333.916	98,73%
1842.003	Layanan Moitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II	1.552.359.000	952.700.000	939.344.400	98,60%	908.285.251	58,51%
1842.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	282.980.000	262.515.000	262.474.800	99,98%	255.644.132	90,34%
1842.005	Dokumen Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat II	154.928.000	112.875.000	111.100.000	98,43%	91.144.142	58,83%
TOTAL		4.382.877.000	3.720.700.000	3.696.004.588	99,34%	3.508.493.039	80,05%

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %	100%	-Audit Inspektorat II -Reviu Inspektorat II	1.775.438.000 613.422.000	1.767.885.009 611.960.379	99,57 99,76
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 %	0,172 %	-			
	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %	-Monev SAKIP	32.300.000	31.967.000	98,97

		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/ atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-Monev SPIP	920.400.000	907.377.400	98,59
--	--	---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

BAB IV

PENUTUP

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2016, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2016 telah berjalan baik, tercermin dari terealisirnya Kegiatan Inspektorat II dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II dalam tahun 2016 telah berjalan dengan baik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2016.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II tahun 2016 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan masih mengalami penundaan jadwal dikarenakan adanya audit dari BPK RI dan adanya penyesuaian jadwal karena ada kegiatan pada Sekretariat Itjen.
2. Adanya perbedaan nilai realisasi keuangan yang tercantum dalam laporan triwulan dengan e-monitoring.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun 2017.
2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.
3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2017 agar tidak terulang kembali.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2016 ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, 17 Januari 2016

INSPEKTUR II

EDY WASPAN